

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan isu penting yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dan menjadi tantangan kompleks dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa dan memiliki luas wilayah sekitar 37.087,92 km², dan Kota Bandung sebagai ibu kotanya. wilayah ini dikenal sebagai pusat budaya Sunda, yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai lokal. Selain itu, Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Meskipun provinsi ini dikenal sebagai pusat budaya Sunda dengan potensi ekonomi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata, sehingga menciptakan tantangan bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mendorong daerah untuk lebih kompetitif dalam mengembangkan ekonomi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial yang serius, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat mendorong pemerataan pembangunan, sering kali pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan

distribusi pendapatan yang adil. Menurut Sahal (2023) rendahnya tingkat ketimpangan ekonomi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pendapatan didistribusikan secara lebih merata akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi juga meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penting bagi kebijakan ekonomi untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada cara distribusi hasil pertumbuhan tersebut agar dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penanganan ketimpangan pendapatan harus menjadi fokus utama, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan baik di dalam maupun antar negara. Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Jawa Barat tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di tingkat nasional. Menurut Adipuryanti & Sudibia (2015) ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan melihat besarnya nilai indeks gini. Indeks gini diartikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan yang nilainya 0 (terjadi pemerataan

sempurna) sampai 1 (terjadi ketimpangan sempurna) (Todaro dan Smith, 2011: 254). Di Indonesia, ketimpangan pendapatan antar provinsi masih terjadi dan terdapat perbedaan yang cukup tinggi pada setiap wilayah. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1, yang menunjukkan fluktuasi nilai indeks Gini di berbagai provinsi pada tahun 2024. Dari grafik tersebut, Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan paling tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta ketimpangan terendah yaitu Provinsi Jawa Tengah.

Berikut gambar grafik perbandingan indeks gini 10 provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2024:



Gambar 1.1 Grafik Indeks Gini Provinsi Di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.1 data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Jawa Barat menempati posisi ketiga dalam ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia dengan rasio Gini sebesar 0,428. Urutan pertama ditempati oleh DKI Jakarta dengan rasio Gini sebesar 0,431, diikuti oleh Yogyakarta dengan rasio Gini 0,428, dan Jawa Barat dengan rasio Gini yang juga mencapai

0,428. Menurut Kepala Badan Badan BPS Jawa Barat Darwis Sitorus menyatakan bahwa rasio gini yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat sebesar 0,428 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Secara wilayah, rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,439, lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan yang sebesar 0,327. Peningkatan rasio gini antara masyarakat perkotaan dan perdesaan ini mengindikasikan bahwa penguasaan sektor ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan belum berjalan secara optimal. Secara umum rasio gini dikategorikan sebagai ketimpangan rendah apabila nilainya kurang dari 0,3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Jawa Barat sangat penting, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di tingkat nasional.

Berikut gambar grafik perkembangan indeks gini provinsi jawa barat dari tahun 2020-2024:



Gambar 1.2 Grafik Indeks Gini Provinsi Jawa barat

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1.2 data Badan Pusat Statistik (BPS). Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat mengalami peningkatan secara bertahap sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021 rasio gini tercatat 0,406, meningkat menjadi 0,412 tahun 2022, tahun 2023 dengan rasio 0,425, dan mencapai 0,428 pada tahun 2024. Nilai rasio Gini yang berada di atas 0,4 ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan dalam kategori sedang. Peningkatan ketimpangan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius yang harus diatasi agar distribusi pendapatan di Jawa Barat dapat menjadi lebih merata. Menurut Rosalitta (2022), Peningkatan menunjukkan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Menurut penelitian Suhendra et al. (2021) perbedaan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh variasi dalam sumber daya yang dimiliki serta ketersediaan faktor produksi termasuk barang modal. Teori Kuznets yang diilustrasikan melalui kurva U terbalik, menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. seiring dengan berjalannya proses pembangunan, ketimpangan tersebut akan mengalami penurunan pada titik tertentu. Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari redistribusi pendapatan dan peningkatan akses terhadap pendidikan.

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kesempatan kerja. tenaga kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (1998) dalam Althofia & Agustina (2015) pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam membentuk modal manusia yang berkualitas. Modal manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. tingkat pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang semakin baik. Menurut penelitian Wulandari & Rahmawati (2022) tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi secara signifikan memengaruhi tingkat distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan positif antara tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas pekerja dengan kemampuan mereka memperoleh pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan penelitian Khoirudin & Musta'in (2020) menjelaskan bahwa produktivitas suatu wilayah berperan

penting dalam menentukan ketimpangan distribusi pendapatan. wilayah dengan sumber daya manusia yang lebih produktif. Baik karena pendidikan, pelatihan, atau akses pekerjaan yang berkualitas cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan produktivitas lebih rendah.

Fenomena ini dapat dipahami dalam konteks ketimpangan ekonomi, di mana kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil semakin melebar. tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi seperti teknologi, jasa profesional, dan industri kreatif. Sektor ini umumnya menawarkan kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor tradisional, seperti pertanian atau sektor informal (Sari & Prasetyo, 2021). Akibatnya distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata, terutama ketika upaya untuk meningkatkan produktivitas tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang inklusif. hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan yang mendukung pemerataan akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi di masyarakat.

Tingkat kesempatan kerja yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap pekerjaan, yang pada akhirnya dapat memperlebar ketimpangan pendapatan di masyarakat. Selain itu menurut BPS provinsi Jawa Barat (2024) terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja antara daerah perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat.

Perkotaan cenderung memiliki lebih banyak peluang kerja yang beragam, mulai dari sektor industri, jasa, hingga teknologi. Sedangkan perdesaan sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dengan akses terbatas terhadap pekerjaan formal dan pengembangan keterampilan.

Berikut Gambar Grafik Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Dari Tahun 2020-2024:



Gambar 1.3 Grafik TPAK Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas terlihat bahwa data perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tingkat kesempatan kerja tercatat sebesar 64,53%, yang kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai angka tertinggi sebesar 67,71% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan kondisi ketenagakerjaan pasca pandemi COVID-19 yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui pengembangan sektor industri dan jasa.

Meskipun demikian, perbedaan signifikan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, antara daerah perkotaan dan pedesaan selama periode 2021-2024 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja belum merata. Daerah perkotaan seperti Kota Bekasi, Bandung, Depok, dan Bogor yang memiliki konsentrasi industri dan jasa tinggi mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan seperti Kabupaten Garut, Cianjur, dan Sukabumi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan ekonomi informal yang cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih terbatas.

Selain kesempatan kerja, tingkat pendidikan juga mempunyai peranan penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Tingkat pendidikan juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga individu lebih mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. di provinsi Jawa Barat terdapat perbedaan yang mencolok dalam akses pendidikan yang berkualitas. Beberapa daerah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan kualitas pengajaran (Ahmad sahal, 2023).

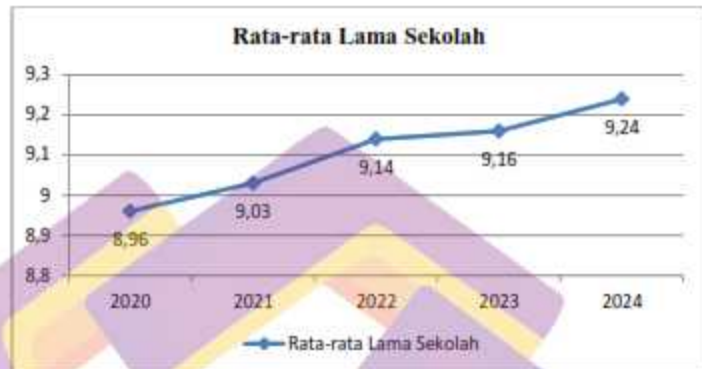
Menurut penelitian Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa akses pendidikan yang terbatas dapat memperburuk ketidaksetaraan, sementara pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi sering kali berkontribusi pada persaingan sumber daya yang lebih

ketat, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi bagi kelompok yang kurang beruntung.

Selain itu, teori Todaro menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam menyerap teknologi dan membangun kapasitas yang diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Teori kuznets juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan distribusi pendapatan, di mana tingkat pendidikan dapat berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi baik penurunan maupun peningkatan ketimpangan pendapatan (Nuraini 2017).

Tingkat pendidikan sering kali diukur menggunakan data rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas pendidikan. RLS memberikan informasi yang penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan ekonomi, karena mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk (World Bank, 2018).

Berikut Gambar Grafik Persentase Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 1.4 Grafik RLS Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.4 rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,96 %, dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai angka tertinggi sebesar 9,24 % pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan selama periode 2021-2024. Daerah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor umumnya memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, sehingga dapat memperluas peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan potensi gaji yang lebih tinggi. Di sisi lain tingkat pendidikan yang rendah dapat mengurangi kesempatan pekerjaan yang lebih berkualitas, dan dapat meningkatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Menurut penelitian Nuraini (2017) hubungan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Selain kesempatan kerja dan pendidikan, tingkat pengangguran terbuka juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Menurut Kuncoro (1997), pengangguran merupakan fenomena yang lebih dominan di daerah perkotaan, di mana tingkat pengangguran terbuka di kota mencapai 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di kota, yang mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Di sisi lain rendahnya angka pengangguran di daerah pedesaan disebabkan oleh urbanisasi, di mana banyak penduduk desa berpindah ke kota atau daerah maju dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun kota atau daerah maju, tidak mampu sepenuhnya menampung arus angkatan kerja dari luar daerah sehingga pengangguran terbuka pun muncul. Dengan kata lain, semakin banyak daerah atau desa yang memiliki angkatan kerja yang besar, maka akan semakin membebani daerah perkotaan atau daerah maju dengan keterbatasan

lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, pengangguran terbuka terjadi akibat pembangunan daerah yang lambat dan tidak merata,

Sehingga tingginya pengangguran akan berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan masyarakat, di mana individu yang tidak memiliki pekerjaan kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya diperoleh dari aktivitas kerja. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, di mana perusahaan cenderung mengurangi produksi dan melakukan pemotongan tenaga kerja untuk menekan biaya. Ketidakstabilan ini berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang lebih rentan terhadap dampak negatif dari kondisi ekonomi yang buruk.

Di Provinsi Jawa Barat, analisis terhadap pengangguran menunjukkan adanya proporsi signifikan individu yang tergolong sebagai setengah pengangguran. Menurut Hindun et al. (2019) kelompok ini mencakup mereka yang bekerja tetapi memiliki penghasilan di bawah tingkat optimal. Meskipun terlibat dalam aktivitas ekonomi, pendapatan yang rendah dapat memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerjaan diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat sehingga menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

Berikut Gambar Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024:



Gambar 1.5 Grafik Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.5 diatas Persentase tingkat pengangguran terbuka yang tercatat pada data BPS Provinsi Jawa barat menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 10,46% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 9,82%. Selanjutnya pada tahun 2022-2024 kondisi TPT di Jawa barat menunjukan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 8,31% (2022), 7,44% (2023), dan 6,75% (2024).

Pengetasan pengangguran di Jawa Barat merupakan isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Menurut data BPS 2024 pengangguran Jawa Barat tercatat sebesar 6,75 persen, dengan jumlah pengangguran mencapai 1,81 juta orang (BPS, 2024). Meskipun terdapat penurunan persentase dibandingkan tahun sebelumnya, tantangan dalam pengetasan pengangguran tetap ada, terutama di kalangan generasi muda.

Beberapa faktor penyebab pengangguran di Jawa Barat meliputi keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kondisi ekonomi yang fluktuatif serta keterbatasan kesempatan kerja (Wulandari & Rahmawati, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan industri, penciptaan lapangan kerja melalui kerjasama dengan sektor swasta, serta dukungan untuk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).

Pada topik pembahasan terkait variable dependen yaitu ketimpangan pendapatan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Emi Nengsih et al. 2023) menunjukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi jambi. Menurut penelitian Istikharoh et al, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY tahun 2008-2018.

Penelitian yang dilakukan Aliyah & Fardida (2024) menunjukan tingkat pendidikan memiliki hubungan positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY, penelitian Wulandari & Sakti (2020) dan Fahmi (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan indonesia.

Penelitian Astuti & Alexandra (2023) dengan hasil penelitian adalah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kalimantan tengah. Sementara itu penelitian

yang dilakukan Muhamad & Rossy (2017) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan banyak memakai beragam variable dan hasil yang tidak sama menjadikan penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan menggunakan tiga variabel bebas yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengembangan lain selain variabel bebas adalah jangka waktu data yang digunakan, yakni data tahun 2021-2024, dengan jenis data *time series* (runtun waktu), dan teknik analisis data yang menggunakan analisis *data panel*. Penelitian ini terdapat pengurangan atau penambahan variabel dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga kondisi dan hasil yang didapatkan akan berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai referensi dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian ini sebagai "Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024."

1.2 Rumusan Masalah

Selama 5 tahun berturut-turut, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan sejak tahun 2020 hingga 2024 bahkan mulai dari tahun 2021 ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan indeks gini ialah 0,406 hingga tahun 2024 meningkat menjadi 0,428 yang mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan sedang yakni diatas 0,4. Peningkatan ini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya ketidakpuasan sosial dan kriminalitas, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini membuat penulis untuk mengetahui bagaimana peran “kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang diambil, pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesempatan kerja terhadap ketimpangan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kesempatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024
2. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat tahun 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat. dengan menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja pendidikan, dan pengangguran, penulis dapat mengembangkan keterampilan analitis dan metodologis yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk karya ilmiah atau publikasi di masa depan.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. dengan mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah mereka.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan di provinsi Jawa Barat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, pemerintah dapat mengimplementasikan program-program yang meningkatkan partisipasi angkatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Bab

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi konteks penelitian, serta rumusan masalah yang disajikan dalam

bentuk pertanyaan penelitian. Selain itu bab ini juga mencakup tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi penulis pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang isi laporan secara keseluruhan

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan ringkas mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian sebelumnya kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Anallsis dan Pembahasan

Pada bagian ini, terdapat penjelasan mengenai analisis hasil pengolahan data dan pembahasan terkait model yang digunakan dalam penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman peneliti untuk perbaikan proses penelitian di masa mendatang.